



**PARTISIPASI POLITIK ANAK TNI DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
DI KELURAHAN CILANDAK TIMUR
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun oleh

PUJI WIDADA

142070212

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
2022**

**KOREKSI PENGUJI**

NO

Dokumen

Tanggal

Terbit

Revisi

: 028/KP/A/STIP-AN

: 9 September 2016

: 1

Nama	: Puji Widada
NPM	: 172070212
Angkatan/Kelas	: VI A2
Program Studi	: Ilmu Politik
Judul	: PARTISIPASI POLITIK ANAK TNI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAUN 2019 DI KELURHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Tanggal SUP	: 30 Agustus 2022

NO	Pembimbing/Penguji	Halaman Perbaikan	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1	Prof.Dt. I Nyoman Sumaryadi,BA,M.Si		- Judul dirubah agar lebih focus pada di lokasi penelitian - Perbaiki Kerangka berpikirnya - Jumlah informannya di perjelas siapa saja yn gmenjadi informannya	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	
2	Arlis,S.IP,M.d		- Perbaiki sesuai catatan yang ada dalam skripsi	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	
3	Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.Si		- Perbaiki sesuai catatan yang ada dalam skripsi	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	

Mengetahui
Program Studi Ilmu Politik
Ketua

Rahadi Budi Prayitno,S.IP.,M.Si

Jakarta,
Pembimbing

Rahadi Budi Prayitno,S.IPi,M.Si

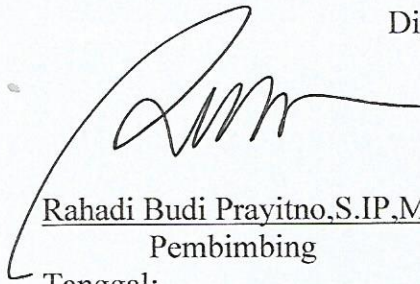
**Partisipasi politik Anak TNI dalam Pemilihan Presiden
Tahun 2019
Di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta**

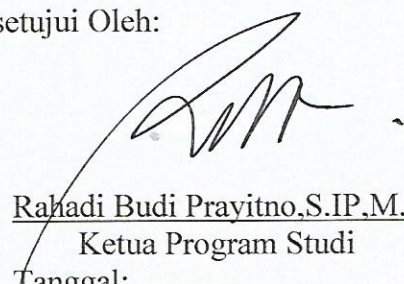
PUJI WIDADA
142070212

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

Diperiksa dan Disetujui Oleh:


Rahadi Budi Prayitno, S.IP, M.Si
Pembimbing
Tanggal:.....


Rahadi Budi Prayitno, S.IP, M.Si
Ketua Program Studi
Tanggal:.....

Mengetahui
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Ketua

Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si
Tanggal:.....

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Puji Widada

NPM : 142070212

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni karya sendiri , apabila saya mengutip dari orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku, Saya bersedia dikenai sanksi pembetulan skripsi ini sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) ,apabila melakukan Tindakan plagiat (penjiplakan)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Oktober 2023

Puji Widada

142070212

ABSTRAK

Partisipasi politik Anak TNI dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019
Di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

Oleh
Puji Widada
142070212

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dari negara yang menganut sistem demokrasi. Berdasarkan UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI dilarang ikut dalam politik praktis, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi keluarga TNI dimana mereka berhak ikut dalam urusan politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik anak TNI dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cilandak Timur menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi, dan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019 adalah menggunakan hak pilih, diskusi politik, dan ikut dalam sosialisasi yang dilakukan KPPS. Dari ketiga bentuk partisipasi politik anak TNI tersebut terdapat bentuk partisipasi politik yang unik yaitu diskusi politik, karena diskusi politik yang mereka lakukan hanya kepada teman sepermainan bukan bersama orang tua mereka dikarenakan status orang tua mereka sebagai TNI yang menjunjung netralitas dalam segala urusan politik. selanjutnya terdapat faktor yang mendorong partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019 adalah adanya rangsangan, karakteristik pribadi seseorang, sosial ekonomi, kesadaran politik, informasi dari media massa dan latar belakang calon kandidat. Faktor pendorong di sini adalah faktor yang mempengaruhi pilihan politik mereka. Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik anak TNI adalah kesibukan sebagai pelajar, kesibukan dalam bekerja, dan anggapan partisipasi politik merupakan kesia-siaan, faktor penghambat di sini adalah faktor yang menghambat mereka untuk ikut dalam partisipasi politik dalam bentuk diskusi politik secara formal, hal ini karena mereka merasakan tidak adanya waktu dan rasa sia-sia bila mengikuti diskusi politik secara formal yang dilakukan oleh pemerintah, parpol, dan media massa.

Parpol, Ormas, dan Media massa dapat meningkatkan partisipasi politik anak TNI dengan diadakannya kegiatan sosialisasi politik, sehingga anak TNI akan lebih tahu akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang memiliki peran besar dalam memilih pemimpin baik di masa depan. KPUD Kota Semarang untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengadakan sosialisasi politik atau diskusi politik untuk kalangan remaja pada setiap Kelurahan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Anak TNI, Pemilihan Umum Presiden

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Partisipasi politik Anak TNI dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

.Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP), pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

Sebagai rasa hormat dan kebanggaan tidaklah berlebihan bila Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang terdalam Penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Ermaya Suradinata,SH,MH,MS selaku Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara
2. Bapak Dr. Sumarsono,MDM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
3. Bapak Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Istri dan anak-anak penulis yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada teman-teman seperjuangan di Angkatan VIA2, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman baik secara langsung maupun tidak langsung telah memotivasi dan membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan harapan dan doa, semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang senantiasa memelihara, menjaga dan memberikan ridho dan rahmatNya yang berlimpah dalam kehidupan, keluarga dan pekerjaan bagi semua pihak yang telah memberikan apa yang mereka miliki kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.

Selain itu, Penulis menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan yang Penulis miliki sudah barang tentu ikut mewarnai penulisan Skripsi ini, karena itu dengan penuh rasa hormat Penulis akan senantiasa memperhatikan segala saran dan petunjuk serta koreksi demi menambah kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Oktober 2023
Penulis

PUJI WIDADA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II. KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	9
2. Bentuk Partisipasi Politik.....	14

3. Faktor Yang Mempengaruhi partisipasi Politik	20
4. Sosialisasi Politik	25
5. Agen Sosialisasi Politik	27
6. Pemilihan Umum Presiden	32
7. TNI	34
B. Studi Literatur	36
C. Kerangka Pemikiran	37
D. Asumsi Penelitian	39

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	40
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	40
C. Latar/setting Penelitian;	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kelurahan Cilandak Timur	50
4.2 Hasil dan Pembahasan	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
---------------	----

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78
A. Pedoman Wawancara	78
B. Surat Ijin Penelitian	80
C. Surat rekomendasi Penelitian.....	81
D. Dokumentasi wawancara	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	42
Tabel 3.2 Data Informan	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	52
Tabel 4.2 Kelembagaan ekonomi	54
Tabel 4.3 Kelembagaan masyarakat	55
Tabel 4.4 Kegiatan Masyarakat	56
Tabel 4.5 Sarana Kesehatan	58
Tabel 4.6 Tenaga Ahli	59
Tabel 4.7 Sarana Pendidikan	59

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar	1.1	Piramida	Partisipasi	Politik
	17			
2. Gambar 2.1		Kerangka Berfikir		39
3. Gambar 3.1		Peta Lokasi Penelitian		41

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Dari STIPAN	80
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Kelurahan	81
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	82

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator yang mencerminkan dimana dalam sebuah negara tersebut sudah tertanam tatanan nilai demokrasi, partisipasi politik ini juga menandakan telah terjadinya perubahan di dalam sebuah negara yang dapat dikatakan kuno menjadi negara yang lebih baik dalam hal ini yang dimaksud negara kuno adalah negara yang mana dalam kehidupan warga masyarakatnya sangat kecil untuk dapat dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin yang mana dalam posisi pemimpin itu diduduki oleh sekelompok kecil elite yang sangat berkuasa. Sehingga dari minimnya hak yang dimiliki warga negara maka seringkali hak warga negara tersebut dikesampingkan dalam perumusan sebuah kebijakan yang akan dibuat, sehingga dari adanya fenomena tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi politik di dalam sebuah negara. Sedangkan negara modern yang dimaksud di sini adalah negara mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, modernisasi di dalam negara tersebut bisa menyangkut segala bidang seperti modernisasi hukum, modernisasi ideologi, dan modernisasi politik yang ada didalamnya.

Partisipasi politik yang merupakan wujud dari negara yang demokratis dimana terdapat sebuah kekuasaan tertinggi yaitu berada pada

kedaulatan rakyat yang sah dan hukum, partisipasi politik ini diimplementasikan dalam sebuah pesta rakyat demokratis atau sering disebut Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan dalam waktu yang tetap. Dari Pemilihan Umum tersebut akan terlihat partisipasi dari sebuah masyarakat, dimana bila partisipasi politik menunjukkan kualitas yang bagus hal ini menandakan bahwa keterlibatan warga masyarakat dapat dikatakan baik dalam kegiatan demokratis dan apabila partisipasi politik yang buruk hal ini menandakan kurangnya perhatian dan niat warga negara dalam kegiatan demokratis, buruknya partisipasi politik tersebut ditandai dengan tidak digunakannya hak pilihnya dalam pemilu atau sering disebut Golongan Putih (Golput) yang sebenarnya golput ini merupakan sebuah catatan tertentu dalam masyarakat yang artinya adanya ketidakpahaman yang terbaik untuk masyarakat tersebut.

Melihat partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia pada era Presiden Soeharto dikatakan berada pada titik kualitas terbaik karena adanya keterlibatan ABRI dalam politik di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya Doktrin Dwifungsi ABRI. Karena pada mulanya dalam UU No. 20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dimana ABRI baru dinyatakan sebagai kekuatan sosial. Akan tetapi dengan adanya UU No. 2/1988 tentang ABRI yang dinyatakan sebagai kekuatan sosial politik juga sebagai kekuatan Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Dengan adanya legalitas berdasarkan hukum tersebut ABRI secara sah ikut dalam praktik politik di Indonesia dan secara langsung menjadi kekuatan yang sangat

penting dalam waktu tiga puluh dua tahun Pemerintahan Presiden Soeharto (Samego, 2000:3).

Seperti yang dikemukakan Harold Crouch (dalam Firdaus, 2018:9) menyatakan “konsep dwifungsi ABRI bukanlah suatu doktrin mati yang ditetapkan untuk selama-lamanya, tetapi doktrin yang hidup, yaitu suatu doktrin dinamis yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman”.

Firdaus (2018:9) menyatakan “hal tersebut senada dengan pandangan dari beberapa pimpinan dan mantan pimpinan ABRI, yang menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI akan terus dilaksanakan sepanjang masa, namun peran sosial politiknya harus disesuaikan dengan perubahan sistem demokrasi yang ada dan sesuai dengan keinginan rakyat mengenai demokrasi”.

Firdaus (2018:10) menyatakan “dominasi militer dalam birokrasi adalah salah satu implikasi bentuk pemberlakuan kebijakan dwifungsi ABRI yang berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia, khususnya terhadap tumbuhnya demokrasi yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sejak awal kemerdekaan memiliki cita-cita terbentuknya negara demokrasi yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila”.

Dari adanya Doktrin Dwifungsi ABRI yang dibentuk Pemerintahan Orde Baru ini menjadikan adanya sebuah pemikiran dimana Dwifungsi ABRI hanyalah sebagai pengalih perhatian yang mana ABRI bukan sebagai alat untuk menjaga kekuatan stabilator dan dinamisator di kekuasaan partai politik yang kebanyakan hanya mementingkan kekuatan

partai, melainkan di sini ABRI adalah sebagai kekuatan untuk menjaga kekuasaan (Golongan Karya) bukan sebagai penjaga kedaulatan negara. Awetnya dukungan ABRI terhadap masa Orde Baru ini disebabkan karena beberapa hal.

Pertama, dibuatnya peraturan khusus UU tentang susunan dan kedudukan anggota DPR/MPR dari kalangan TNI aktif melalui jalur pengangkatan, hal ini dilakukan untuk menyeimbangi kekuatan partai politik serta mencegah partai politik yang dapat mengancam jalannya pemerintahan. Sehingga dari adanya jalur pengangkatan TNI di kursi DPR/MPR ini diharapkan mampu menjadi fondasi serta pagar penghalang untuk para elit politik yang ingin melakukan perubahan dasar UUD 1945. Kedua, diberikannya jabatan-jabatan penting di pusat maupun daerah, bahkan para perwira TNI dijadikan duta besar di beberapa negara besar seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman Barat, Jepang, Perancis, Inggris, dan Singapura. Ketiga, di pemerintahan Presiden Soeharto keluarga TNI diberi kemudahan dalam menjalankan bisnis perusahaan hutan hingga pelayanan angkutan udara, sehingga banyak bisnis dengan embel-embel nama TNI. Dengan begitu kekuatan TNI akan lebih mengikat kencang kekuasaan Soeharto saat itu karena banyaknya perlakuan istimewa yang didapatkan (Samego, 2000:3-5).

Maliki (2018:250) menyebutkan bahwa “selama masa Orde Baru negara sangat kuat. Tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari negara, masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi politik, Masyarakat

dimobilisasi oleh negara. Partisipasi bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan. Partisipasi berubah makna menjadi turut serta memberi sumbangan dari proyek pemerintah yang biayanya kurang”.

Sempitnya ruang partisipasi politik masyarakat selama masa Orde Baru adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, akan tetapi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat tinggi karena ada unsur mobilisasi didalamnya.

Berlanjut pada era Reformasi dimana peran ABRI dalam kehidupan sosial politiknya mengalami perubahan yang dikarenakan munculnya penolakan dari beberapa unsur yang ada dalam masyarakat dengan begitu pada masa Reformasi ini terdapat pemisahan fungsi ABRI yang dipecah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dimana kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda yang mana TNI memiliki tugas untuk tetap menjaga keamanan NKRI dari serangan negara lain sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertib hukum (Sunarto, 2016:82-83).

Pemisahan antara TNI dengan Polri tersebut berjalan hingga saat ini setelah disahkannya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004.

Fungsi TNI yang mana telah di atur dalam UU No 34 tahun 2004

pasal 6 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai, 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, 2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kemudian untuk tugas TNI yang diatur dalam UU No 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam UU No 34 tahun 2004 pasal 39 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam 1) kegiatan menjadi anggota partai politik, 2) kegiatan politik praktis 3) kegiatan bisnis dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Dewasa ini yang menjadi kebingungan di dalam era Reformasi ini adalah penggunaan hak pilih yang dimiliki oleh kalangan TNI, dimana TNI dalam UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilarang ikut dalam ranah politik praktis demi dapat berdiri di segala

golongan akan tetapi dalam konteks HAM TNI merupakan WNI yang juga memiliki hak dalam menggunakan hak pilihnya.

Hal yang menjadi pertimbangan di sini jika TNI tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum adalah karena adanya garis komando atau hirarkhi komando yang berdampak pada ketaatan prajurit terhadap atasan, sehingga dukungan politik para Jenderal akan sangat mempengaruhi dukungan politik prajuritnya. Masalahnya di sini dukungan politik para Jenderal tidak bisa berjalan pada satu jalur, katakanlah bila ada dua Panglima purnawirawan yang bertarung di pemilihan Presiden tentu para Jenderal tak akan mendukung kedua calon tersebut yang mana hal itu dapat menimbulkan perpecahan internal didalam tubuh TNI. Dari adanya hierarki komando ini juga yang membedakan kualitas serta wibawa elit politik yang datang dari kalangan TNI dengan elit politik yang datang dari kalangan sipil (Sunarto, 2016:83).

Dari adanya sejarah yang panjang mengenai keterlibatan TNI dalam urusan politik yang dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi hingga sekarang, muncullah sebuah komitmen dalam TNI tersebut yang menyatakan bahwa untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum guna untuk menjalankan tugas dari TNI yang mampu berdiri disegala golongan juga sebagai menjaga keutuhan dalam tubuh TNI itu sendiri (Sunarto, 2016:83).

Sehingga dari adanya komitmen TNI untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tersebut hal ini tidak berlaku kepada

keluarga dari TNI. Penelitian ini menarik karena anak TNI dapat menggunakan hak pilihnya karena status mereka bukan sebagai TNI melainkan hanya sebagai Warga Negara Indonesia biasa. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji guna mengetahui partisipasi politik dari keluarga TNI terutama pada anak-anak mereka yang tinggal di lingkungan Asrama TNI.

Asrama TNI merupakan salah satu tempat dilarang untuk dilakukan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye (APK) karena merupakan bangunan dan fasilitas milik pemerintah, yang telah disebutkan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Larangan APK di Asrama TNI dinyatakan oleh Subadri yang menyatakan. “tentu pasti semua anggota partai politik tahu di sini kan asrama TNI ya jadi tidak boleh ada kegiatan kampanye politik dan APK, bila ada yang nekat pasang APK nanti saya copoti”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan memang benar bahwa di Asrama Bumi Marinir Cilandak tidak terdapat satupun APK yang terpasang di lingkungan Asrama, pemasangan APK baru terlihat sekitar 50 meter sebelum gapura masuk di Asrama Bumi Marinir Cilandak. Asrama Bumi Marinir Cilandak merupakan asrama TNI yang memiliki penduduk sebanyak 223 kepala keluarga, terdiri dari kalangan TNI aktif maupun TNI yang sudah Purnawirawan dengan pangkat tinggi. Sehingga dari adanya kelompok TNI Purnawirawan tersebut akan lebih menarik untuk melakukan penelitian di Asrama Bumi Marinir

Cilandak tersebut karena pada dasarnya terdapat TNI aktif yang dilarang menggunakan hak pilihnya berdasarkan UU 34 tahun 2004, berubah menjadi boleh menggunakan hak pilihnya dikarenakan status TNI Purnawirawan. Selain itu dari adanya peraturan KPU larangan memasang alat peraga kampanye di lokasi ini menambahkan keunikan karena APK yang berfungsi untuk mempengaruhi hak pilih akan tetapi di lokasi ini hal tersebut tidak berlaku, sehingga hal tersebut dimungkinkan dapat berdampak pada kurangnya informasi keluarga TNI terhadap visi misi calon Presiden. Kemudian dari jumlah penduduk yang besar di lokasi ini diharapkan terdapat banyaknya jumlah anak TNI aktif yang telah memiliki hak pilih ketika Pemilihan Umum Presiden tahun 2019.

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan penulis akan mengangkat judul tentang “PARTISIPASI POLITIK ANAK TNI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 Di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta”

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang di atas maka muncullah pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik anak TNI di Asrama Bumi Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pemilihan

Presiden tahun 2019?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Bumi Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kevamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pemilihan Presiden tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui partisipasi politik anak TNI di Asrama Bumi Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kevamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pemilihan Presiden tahun 2019.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Bumi Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kevamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Anak TNI ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi dengan apa yang ada di lapangan terutama pada partisipasi politik anak TNI di Asrama Bumi

Marinir Cilandak.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat referensi bagi dunia akademisi dalam bidang politik terutama pada konsep partisipasi politik khususnya anak TNI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Anak TNI

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan hal baru terkait realitas sosial terhadap anak TNI di Asrama Bumi Marinir Cilandak, sehingga dengan begitu anak TNI dapat menyerap hal-hal yang baik mengenai partisipasi politik untuk kedepannya.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan literasi bagi akademisi untuk lebih memperluas kajian tentang partisipasi politik yang ada di dunia. Serta menambah kemampuan untuk menganalisis bentuk partisipasi partisipasi politik.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Partisipasi Politik

Mengawali tinjauan pustaka teorisasi tentang partisipasi politik menjadi pembahasan yang pertama, Suryadi (2007:128) menjelaskan “konsep partisipasi politik menjadi penting dan urgen pada masa demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagai prasyarat dari bangunan atau berkembangnya demokrasi”.

Sherman dan Kolker (dalam Suryadi, 2007:128) menyebutkan bahwa “partisipasi politik merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah. Sehingga dalam Proses mempengaruhi dan mengontrol pemerintah itu, dapat dalam berupa kelembagaan atau non kelembagaan”.

Peter (dalam Surbakti, 2010:179-180) menyebutkan “partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri”.

Herbert McClosky berpendapat (dalam Budiardjo, 2013:367) mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will*

refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly , ¹² rectly in the formation of public policy)”.

Dalam melakukan kajian partisipasi politik dinegara berkembang Huntington dan Nelson (dalam Handoyo, 2000:206) mengartikan “partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.

Partisipasi politik merupakan hak seluruh warga negara termasuk anggota TNI yang sudah purnawirawan akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi anggota TNI yang masih aktif dimana mereka harus tetap menjaga netralitas mereka dalam segala urusan politik.

Huntington (dalam Sastroatmodjo, 1995:70) “mengatakan di negara-negara berkembang cenderung partisipasi digerakkan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Partisipasi bahkan sulit dibedakan dari unsur mobilisasi. Apabila dilakukan oleh pelakunya sendiri, partisipasi politik dinamakan partisipasi otonom, sedangkan jika yang menggerakkan orang lain disebut partisipasi yang dimobilisasi”.

Di beberapa negara terdapat orang yang memberikan suara atau berdemo guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi kegiatan yang dilakukan mereka seringkali tidaklah muncul dari hati nurani pribadi yang ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah melainkan adanya imbalan yang diberikan untuk melancarkan aksi. Weine mengatakan bahwa partisipasi politik yang muncul bukan karena ego mereka sendiri maka hal tersebut

tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi politik (dalam Sastroatmodjo, 1995:71).

Banyak masyarakat yang seringkali aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui berbagai kegiatan, akan tetapi sering kali partisipasi politik mereka tidak murni muncul secara mandiri melainkan dipengaruhi (dimobilisasi) oleh sebuah partai politik atau kelompok.

Pengertian dari partisipasi politik untuk lebih singkat, padat, dan jelas akan di sampaikan oleh Surbakti (dalam Handoyo, 2000:205- 206) “partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”.

Pengertian partisipasi politik juga disampaikan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Maran, 2007:147) yang menyatakan bahwa “partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan”.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Ada banyak sekali bentuk dari partisipasi politik, akan tetapi pemahaman yang paling dasar di dalam masyarakat dalam bentuk partisipasi politik adalah penggunaan hak suara mereka dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara seperti lembaga eksekutif dan legislatif atau memilih pemimpin lainnya. Padahal menggunakan hak suara dalam pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling sederhana dan kecil, masih ada

banyak bentuk partisipasi politik yang kapasitasnya lebih tinggi, partisipasi adalah sebuah kegiatan yang mana juga dapat dilihat dari berbagai sisi seperti partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Sastroatmodjo (1995:74) mengartikan partisipasi aktif dan partisipasi pasif adalah sebagai berikut:

Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Di pihak lain partisipasi pasif, antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Bentuk partisipasi politik juga dibedakan menjadi empat kategori menurut Milbrath dan Goel (dalam Sudijono Sastroatmodjo, 1995:74-75) sebagai berikut:

Kategori pertama adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua adalah spektator. kategori kedua ini berupa orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Ketiga gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Keempat pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Ruslan (dalam Handoyo, 2000:212) menemukan bentuk partisipasi politik yang tidak hanya terbatas pada pemberian suara pada saat pemilihan umum, akan tetapi partisipasi politik lebih luas dan beragam bentuknya. Bentuk dari partisipasi politik lainnya antara lain adalah sebagai berikut.

a. Sensitif terhadap persoalan politik dan sosial dengan cara

mengikuti perkembangan politik melalui berbagai kegiatan seperti seminar, symposium, kongres, melihat berita di TV dan diskusi kelompok

- b. Ikut dalam kegiatan kampanye politik, misalnya kegiatan kampanye calon eksekutif atau legislatif.
- c. Menggelar aksi demonstrasi guna mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah.
- d. Berkontribusi secara nyata dalam berbagai kegiatan, seperti mendirikan komunitas peduli lingkungan.
- e. Bergabung dengan suatu partai politik

Suryadi (2007:134) memberikan pendapatnya tentang pemberian suara dalam pemilihan umum:

Pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Namun pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat. Jadi pemberian suara itu merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa.

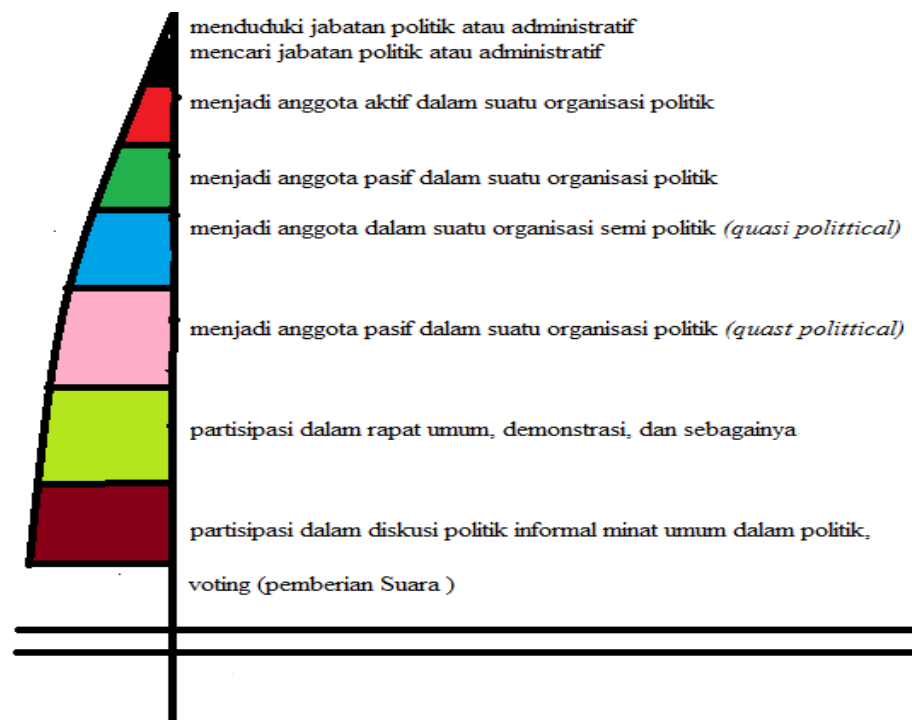
Jadi meskipun pemberian suara merupakan wujud partisipasi politik yang lebih dikenal oleh masyarakat, namun beberapa bentuk partisipasi di atas juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Maran (2007:148), berpendapat bahwa “bentuk partisipasi politik

yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”

Huntington dan Nelson (dalam Handoyo, 2008:212) menyatakan “secara sistematis menyebutkan lima bentuk partisipasi politik berdasarkan riset yang telah mereka lakukan. Kelima bentuk itu adalah: (1) kegiatan pemilihan, (2) *lobbying*, (3) kegiatan organisasi, (4) mencari koneksi (*contacting*), dan (5) tindak kekerasan (*violence*)”.

Kemudian Michael Rush dan Phillip Althoff menyebutkan bentuk partisipasi politik melalui gambar berikut.



Gambar 1. Bentuk Partisipasi Politik Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff
Sumber: Michael Rush dan Philip Althoff (1990:124)

Macam partisipasi politik konvensional dan non-konvensional yang

terjadi berbagai negara. “Kegiatan politik ‘konvensional’ adalah bentuk partisipasi politik yang ‘normal’ dalam demokrasi modern. Bentuk ‘Non-konvensional’ termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warganegara” (Mas’oed dan MacAndrews, 2008:57-58).

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian Suara	Pengajuan Petisi
Diskusi Politik	
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok Kerja
Komunikasi individual dengan pejabat publik dan administratif	
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Mas’oed dan MacAndrews (2008:58).

3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam segala hal mengenai fenomena, kejadian atau tindakan di dalam dunia ini pasti bermula dari sebuah istilah ada sebab ada akibat, tak luput pula dalam tindakan partisipasi politik yang mana didalam partisipasi politik terdapat sebuah unsur yang mendorong terjadinya partisipasi politik tersebut, dorongan di sini bukan hanya saja dorongan yang mengarahkan kedalam tingginya tingkat partisipasi politik akan tetapi dorongan di sini juga mengarahkan kedalam rendah atau kecilnya dari partisipasi politik itu sendiri. Dari macam-macam faktor

partisipasi politik tersebut akan mengarahkan bagaimana cara yang akan dilakukan masyarakat untuk menggambarkan perilaku dari partisipasi politik itu sendiri.

Era yang modern seperti ini segala informasi dapat dengan cepat disebarluaskan, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi politik di dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Handoyo (2000:216) “media massa juga merupakan faktor makro yang cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik warga negara. Berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa, individu warga negara dapat mengetahui secara cepat peristiwa atau kejadian politik aktual di lingkungannya, memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengambil sikap (afeksi) tertentu berkenaan dengan peristiwa politik tersebut”.

Myron Weiner (dalam Mas’oed dan Colin MacAndrews, 2008:56-57) menyebutkan terdapat lima hal yang menyebabkan terjadinya partisipasi yang lebih luas dalam politik, antara lain sebagai berikut.

1. Modernisasi. Terjadinya perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, pesatnya media informasi komunikasi dan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sehingga dari adanya perubahan pada seluruh bidang mengakibatkan persaingan semakin ketat dan masyarakat sadar bahwa mereka dapat menentukan keinginan mereka, sehingga mereka akan lebih menentukan untuk ikut dalam kekuatan politik dalam pemerintahan.
2. Perubahan-perubahan Struktural Kelas Sosial. Dengan terbentuknya kelas

sosial baru dan adanya industrialisasi dan modernisasi yang mengakibatkan semakin banyaknya kelas sosial menengah sehingga berdampak pada siapa yang berhak dalam pembuatan keputusan politik dan hal tersebut mengakibatkan perubahan pada pola partisipasi politik.

3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern.

Adanya kaum intelektual yang menciptakan idea tentang egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat kedalam pengambilan keputusan politik. Dari adanya penyempurnaan dalam bidang transportasi dan informasi membantu mempercepat idea tersebut tersebar luas sehingga dengan mudah untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam partisipasi politik.

4. Konflik di antara Kelompok-kelompok Pemimpin Politik. Dari adanya konflik banyak dari kelompok yang berkonflik mencari dukungan rakyat yang mengakibatkan rakyat terbelah karena berbeda dalam hal dukungan, sehingga hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih dalam berpartisipasi karena keinginan mereka untuk memenangkan pemimpin yang mereka dukung.

5. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial.

Ekonomi dan Kebudayaan. Semakin ikut campurnya pemerintah kedalam kehidupan rakyat, maka rakyat semakin dikontrol dalam berbagai kegiatan yang mana bila hal ini tidak adanya kontrol dari masyarakat maka masyarakat dapat sangat dirugikan. Sehingga dari situ masyarakat akan lebih melibatkan diri dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan mereka.

Alexander Abe (dalam Hery Kusmanto, 2013:45) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk serta kualitas dari partisipasi politik di dalam masyarakat.

1. Faktor Sosial Ekonomi, dilihat berdasarkan pendapatan ekonomi, kualitas pendidikan, dan jumlah keluarga.
2. Faktor Politik, faktor politik ini terbagi menjadi komunikasi politik dimana sebuah komunikasi yang konotasinya mengenai politik yang bertujuan mengatur manusia. Kesadaran politik, hal ini berbicara tentang kepekaan masyarakat didalam menghadapi kondisi negara. Pengetahuan masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan, hal ini akan mempengaruhi bentuk dari keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik, hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menggiring suatu kebijakan agar tidak menyeleweng dari wewenang yang dimiliki pemerintah melalui kritik dan saran.
3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan, Faktor fisik individu ketersediaan dan penggunaan fasilitas demi keberlangsungan hidup. Faktor lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang utuh yang terdiri dari seluruh material yang ada didalamnya.
4. Faktor Nilai Budaya, hal ini berkaitan tentang bagaimana bentuk dari demokrasi kita nantinya dalam menjalankan sebuah sistem politik.

Rosenberg (dalam Maran, 2007:156) menyebutkan tiga alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak ingin ikut dalam partisipasi politik yaitu:

Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Di sini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia, karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sini orang, misalnya, tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Lipset (dalam Mujani, 2007:255) “bahkan mengeklaim bahwa partisipasi politik yang rendah baik untuk demokrasi. Ia memberi kontribusi untuk stabilitas demokrasi. Beberapa penulis pada tahun 1950 an dan 1960 an membuat klaim yang serupa, bahwa partisipasi politik yang rendah kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi”.

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik dikemukakan oleh Setiadi dan Kolip (dalam Nurchotimah, 2015:40) adalah faktor sosio-ekonomi dan politik, faktor ini berkaitan dengan keadaan sosio-ekonomi dan politik di tempat individu berada. Individu yang memiliki status ekonomi yang rendah tidak memiliki waktu untuk ikut dalam partisipasi politik hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki status ekonomi yang tinggi. Bukan hanya ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik tetapi juga status sosial masyarakat, sehingga lingkungan yang selama ini mereka tempati akan selalu mempengaruhi mereka dalam partisipasi politik.

Lindenfield (dalam Maran, 2007:156) berpendapat “bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfield menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan

politik, dan yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi”.

Selanjutnya Milbarath (dalam Maran, 2007:156-157) berpendapat bahwa dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Asrama Bumi Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat empat faktor utama yang mendorong seseorang untuk ikut aktif dalam proses partisipasi politik. Pertama, adanya rangsangan, dimana hal ini dapat ditemukan pada kegiatan yang bersifat komunikasi dalam membahas suatu persoalan. Kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang, dimana dalam ini menyangkut sisi dalam dari seseorang disebutkan bahwa seseorang yang berjiwa sosial tinggi akan sangat peka terhadap isu-isu yang berada disekitarnya bisa saja mengenai isu politik, kesehatan, ekonomi, pembangunan dll. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang, hal ini berkaitan dengan ekonomi, ras, kelompok etnis dan agama dimana didalam semua hal tersebut terdapat nilai yang baik, bila nilai yang baik tersebut melekat pada diri seseorang maka seseorang akan senantiasa berusaha untuk menyebarkannya kepada lingkungan sosialnya melalui berpartisipasi politik. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, situasi yang aman tidak ada paksaan atau ancaman dengan menjunjung nilai demokrasi akan mendorong seseorang untuk ikut dalam partisipasi politik karena mereka tidak takut untuk menyuarakan keinginan mereka.

Surbakti (2010:185) berpendapat bahwa “seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan

politik, tetapi juga memiliki minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan pada pemerintah”..

Huntington dan Nelson (1994:62-63) dalam studinya berpendapat:

Pembangunan sosioekonomi biasanya bertambah dengan cara yang agak mantap dalam perjalanan waktu. Akan tetapi di banyak masyarakat, tingkat partisipasi dalam pungutan suara atau bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam periode yang cukup pendek. Mungkin saja terjadi perluasan partisipasi yang mendadak dan kemerosotan yang sama mencoloknya dalam partisipasi. “Di banyak negara yang masih dianggap relatif terbelakang”, demikian Burnner dan Brewer, “sudah ada tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam pemungutan suara, dan nampaknya tidak mempunyai perkembangan sekuler yang jelas menuju kepada peningkatan jumlah orang memberikan suara itu”. Di Turki dan Kolombia dalam tahun-tahun sesudah Perang Dunia II, ada periode-periode di masa partisipasi dalam pemungutan suara menurun dengan tajam. Angka-angka itu dapat berarti bahwa jumlah orang yang memberikan suara tidak mencerminkan tingkat partisipasi secara keseluruhan. Mungkin saja sebuah negara yang belum berkembang mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi pemungutan suara, akan tetapi tingkat yang rendah dalam bentuk partisipasi lainnya.

Huntington dan Nelson (1994:160) yang berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kesibukan masing-masing biasanya akan lebih fokus terhadap kesibukan yang selama ini mereka jalani, ketimbang ikut dalam urusan partisipasi politik yang selama ini tidak relevan dengan urusan yang mereka jalani selama ini dan mungkin tidak ada gunanya.

Nursal (dalam Daud, 2015:91) “juga menawarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang didasarkan pada penyederhanaan aliran-aliran sebelumnya yang meliputi: image sosial/pengelompokan sosial, identifikasi partai, calon (*emotional feelings dan candidate personality*), isu dan kebijakan politik, peristiwa tertentu (peristiwa mutakhir dan peristiwa personal) dan *epistemic issues*.”

Liddle, Mujani dan Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 121:2015) berpendapat “bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa, maupun kelas”.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 119:2015) menyebutkan “faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat religiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu”.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 122-133:2015) pilihan rasional dilihat berdasarkan “identitas partai (*partisanship*), predisposisi atas kebijakan-kebijakan pemerintah beserta persepsi tentang kondisi saat ini, evaluasi atas kinerja partai atau pejabat yang berkuasa, persepsi tentang citra personalitas calon, hingga prospek calon atau partai jika terpilih (berkuasa). Jadi, pilihan untuk berpartisipasi atau memilih partai atau kandidat tertentu merupakan kompleksitas dari berbagai faktor dalam ketiga model tersebut”.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah sebuah proses pengenalan terhadap anak mengenai hal baru yang perlu mereka ketahui mulai dari hal mendasar hingga seperti norma hingga politik. Seperti pengertian “Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang

menunjukkan bagaimana seharusnya masing- masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan akan-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakat” (Mas’oed dan MacAndrews, 2008: 42).

Sementara itu pengertian sosialisasi politik menurut Fred I. Greenstein (dalam Fonataba, 2016:6) adalah:

Sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktik-praktik politik oleh badan- badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Hasan (2006:19) menyebutkan “dalam berbagai kepustakaan kita telah banyak membaca bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang mempengaruhi baik anak maupun orang dewasa secara politik tanpa sengaja dan tanpa refleksi harus hidup menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan ketentuan dari struktur-struktur politik yang ada di masyarakat”.

Rush dan Philip Althoff (dalam Handoyo, 2008:171) mengatakan bahwa “sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi- posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam- macam badan masyarakat”.

Mas’oed dan MacAndrews (2008:42-43) mengungkapkan terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam proses sosialisasi politik.

Pertama, bahwa sosialisasi itu berjalan seumur hidup. Jadi sikap yang dibentuk orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil dapat berubah menjadi semakin kuat sesuai arah sosialisasi dari orang tua atau bahkan berkembang ketika anak tersebut tumbuh dan berbaur dengan lingkungan lainnya seperti lingkungan kerja atau lembaga pendidikan. Adanya perang juga dapat menjadi berubahnya pandangan politik dalam masyarakat akan tetapi peristiwa semacam ini lebih berpengaruh terhadap golongan berusia muda dikarenakan sifat politik mereka yang masih fleksibel. Kedua, sosialisasi politik berwujud transmisi dan pengajaran langsung dan tidak langsung. Pengajaran langsung berupa tindakan politik secara eksplisit seperti adanya pelajaran kewarganegaraan. Sedangkan pengajaran tak langsung dimana hal ini berjalan dimasa kanak-kanak apakah anak itu akan menjadi anak penurut atau pembangkang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mereka ketika dewasa.

5. Agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik tidak terjadi dan terbentuk begitu saja melainkan ada beberapa lembaga ataupun agen-agen dalam kehidupan masyarakat yang ikut dalam membentuk, mempengaruhi dan mendorong hingga terjadinya sosialisasi politik tersebut. Agen-agen tersebut adalah keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan (sekolah), media masa, teman bermain, dan kontak politik langsung.

Dari seluruh agen atau lembaga sosialisasi politik yang disebutkan di atas, bahwa agen sosialisasi yang paling berpengaruh adalah keluarga,

kelompok pertemanan, dan sekolah dimana hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini (Handoyo, 2008:173-177).

1. Keluarga, pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tak langsung merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak yang dibuat bersifat anti keengganan untuk mematuhi dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan- kecakapan untuk melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa. Keluarga juga memberikan sikap-sikap politik masa depan, menempatkan individu dalam lingkungan masyarakat, membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, kelas sosial, memperkuat nilai-nilai dan prestasi cultural serta mengarahkan aspirasi aspirasi pekerjaan dan ekonominya.
2. Sekolah. Sekolah yang merupakan sebuah monopoli dalam memberikan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dan dikembangkan masyarakat, memberikan peluang yang sangat besar kepada sekolah untuk memainkan peranannya sebagai lembaga tempat nilai nilai dan masyarakat disemaikan dan diwariskan. Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran beraneka ragam kegiatan ritual dan

kegiatan-kegiatan guru. Instrumen formal untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan kepada anak didik, sekolah melalui kurikulumnya memiliki kemampuan potensial untuk berperan sebagai instrumen sosialisasi politik. Melalui kurikulum ini pula, sekolah dapat memberikan pandangan- pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap aturan permainan politik yang tak tertulis. Seperti yang terjadi sekolah-sekolah negeri di Inggris. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem tersebut. Melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan misalnya, anak didik dilatih dan dibina menjadi negara yang baik dan menjadi partisipan aktif dalam kehidupan politik. Demikian pula, melalui indoktrinasi politik, anak didik diarahkan untuk mempelajari dan menguasai ideologi politik tertentu yang dirancang untuk merasionalisasi dan membenarkan suatu rezim. Kendati tidak selalu berhasil, kurikulum sekolah memainkan sebagai sarana kunci bagi siswa memperoleh pengetahuan tentang kehidupan politik dan membangun loyalitas terhadap negara. Peranan tersebut menjadi lebih penting lagi bersamaan dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk suatu negara yang mengisi usia formatifnya di sekolah. Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan extra yang

diselenggarakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

3. Peranan kelompok pertemanan sebagai agen sosialisasi semakin penting dan meluas. Pada masyarakat modern (industry), anak-anak mulai berpaling dari garis keturunan dan otoritas mereka kepada orientasi-orientasi baru bagi perilaku sosial dan politik mereka. Acuan perilaku mereka dapat ditemukan kelompok pertemanan atau pergaulan. Kelompok pertemanan mengambil peran penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Talcott Parson menyatakan bahwa kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa orang tua dan berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figure otoritas pemberi (transmitter) proses belajar sosial kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja, dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Pengaruh sosialisasi yang penting dari kelompok pertemanan bersumber di dalam faktor-faktor yang membuat peranan keluarga menjadi sangat penting dalam sosialisasi politik, yaitu: (1) akses yang sangat ekstensif dari kelompok-kelompok pertemanan terhadap anggota-anggota mereka, dan (2) hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang didalamnya.
4. Pekerjaan dibentuk berdasarkan formal maupun non formal yang dibentuk dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh sosial dan yang sejenisnya merupakan seluruh komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu

biasanya mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu seperti serikat buruh dan menggunakan kelompok-kelompok tersebut sebagai acuan (reference) dalam kehidupan politik. Mereka cenderung sensitive terhadap norma-norma kelompok dan menilai tindakan-tindakannya berdasarkan perhitungan (kalkulasi) apa yang paling baik bagi kelompok tersebut. Berpartisipasi dalam suatu tawar-menawar kolektif atau berdemonstrasi merupakan pengalaman sosialisasi berkesan bagi buruh maupun majikan. Buruh yang berdemonstrasi dapat mengetahui bahwa ia dapat mempengaruhi bentuk keputusan yang akan mempengaruhi masa depannya yang sedang dibuat dan ia memperoleh juga pengetahuan tentang kecakapan-kecakapan bertindak tertentu seperti berdemonstrasi dan mogok yang bisa digunakan kalau ia berpartisipasi lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan politik lain.

5. Media massa, media massa masyarakat modern tak dapat hidup dengan baik tanpa komunikasi yang luas, cepat dan beragam. Sebagian besar masyarakat dunia, telah menjadi satu kelompok penonton tunggal yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Media massa seperti: surat kabar, radio, majalah, televisi dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan informasi tentang-informasi politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.
6. Kontak-kontak politik langsung, tidak peduli betapa positifnya pandangan terhadap sistem politik telah ditanamkan oleh keluarga

atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami ketidakadilan atau teraniaya didalam militer, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, perang krisis politik negeri dan daya badan-badan pemerintahan terhadap tuntutan- tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan mereka untuk mematuhi hukum dan sistem politik secara luas.

Agen sosialisasi politik yang pertama dan utama adalah keluarga, dalam keluarga TNI sosialisasi politik ini mungkin hanya berjalan sebagian saja karena terdapat orang tua mereka yang berstatus sebagai TNI aktif yang netral dalam urusan politik. Tetapi sosialisasi politik ini dapat berjalan seutuhnya bila status orang tua mereka sebagai TNI aktif sudah berubah menjadi TNI purnawirawan.

6. Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum disebut juga dengan '*political market*' artinya pemilihan umum adalah pasar politik dimana di situ terdapat jual beli antara peserta pemilu dengan masyarakat yang telah memiliki hak suara dimana sebelumnya peserta pemilu menawarkan produk yang dimiliki melalui kampanye dengan berbagai media dan masyarakat membelinya dengan menggunakan hak pilihnya kepada peserta pemilu ataupun partai politik (Fonataba, 2016:5).

Budiardjo (2013:461) menyebutkan “dikebanyakan negara demokrasi,

pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat”.

Pemilihan umum atau sering di sebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagai salah satu implementasi dari negara yang demokratis. Marijan (2010:83) menjelaskan “secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara didalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variable-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaran (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*)”.

Pemilihan Presiden atau Pilpres adalah sebuah implementasi dari salah satu pilar demokratis yaitu adanya pemilihan umum yang bertujuan untuk terjadinya regenerasi kepemimpinan yang berguna agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan didalam menggunakan kewenangannya. Dalam pemilihan presiden warga yang boleh ikut dalam pelaksanaannya adalah warga yang telah melakukan administratif setempat dan memiliki hak pilih secara sah berdasarkan undang-undang pemilihan umum.

Salah satu bagian yang bisa kita ambil dalam ruang partisipasi yaitu pemilihan umum. Pemilu adalah sarana politik yang diciptakan sebagai ruang untuk warga negara dalam berpartisipasi untuk memilih

pemimpin. Pemilu dalam konteks Negara Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali baik pemilihan lembaga legislatif maupun eksekutif termasuk pemilihan presiden (Fonataba, 2016:3).

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh negara yang aturannya dimuat ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan dimana Asshiddiqie (2006:10) mengungkapkan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan superstruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum).

7. TNI

Samuel P. Huntington (dalam Sunarto, 2016:77) “membedakan tipe militer menjadi 2 (dua) macam, yaitu *militer profesional* dan *tentara praetorian*”. Disamping dua tipe militer yang disebutkan oleh Samuel P

Huntington, masih terdapat satu lagi tipe militer menurut Amos perlmutter (dalam Sunarto, 2016:77) yaitu tipe tentara professional revolusioner.

Pertama, profesionalisme militer adalah tentara yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk pengabdianya yang ditunjukkan hanya negara, dari adanya hal tersebut maka muncullah *military mind* yang menimbulkan adanya pandangan terhadap supremasi sipil. Kedua, tentara praetorian adalah tentara yang mana terlibat dalam dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas di dalam pemerintahan dan juga dalam pertahanan. Ketiga, professional revolusioner adalah tentara yang lahir karena adanya keinginan untuk melawan dan lepas dari penjajah, dimana masyarakat berlatih kemiliteran guna memperjuangkan kebebasan mereka hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam masyarakat (Sunarto, 2016:77-78).

Indonesia pada masa lalu yaitu pada masa Pemerintahan Soeharto TNI merupakan kekuatan yang besar dalam sosial politik di Indonesia dengan doktrin Dwifungsi ABRI yang didukung dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, akan tetapi setelah runtuhnya Pemerintahan Soeharto TNI mengalami perubahan yang cukup besar dalam bidang politik. Regulasi TNI saat ini diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disebutkan dalam pasal 39 bahwa TNI dilarang ikut dalam politik praktis di Indonesia. Sehingga dengan adanya No 34 Tahun 2004 kedudukan TNI sangat berbeda jauh ketika masa Orde Baru yang mana di masa kini TNI benar-benar netral dalam urusan politik.

B. Studi Literatur

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang relevan. Penelitian yang memiliki objek yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amorowayan A yang berjudul “Partisipasi politik Masyarakat Tionghoa di Desa Tluwah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017” menyimpulkan bentuk partisipasi politik, yaitu kegiatan diskusi politik informal dan pemberian suara. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 terdiri dari kesadaran politik, kepercayaan pada pemerintah sebelumnya, pendidikan yang tinggi dan status sosial ekonomi.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Aulia Shilichah Iman Nurchotimah yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014” menyimpulkan bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari dapat ditemukan pada saat sebelum pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan setelah pemilihan Presiden 2014. Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih pemula yang dimaksud adalah pemberian suara, kegiatan kampanye, diskusi politik, memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui media massa, menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk

meluruskan kebijakan. Kemudian Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari pada Pemilihan Presiden 2014 adalah berdomisili di luar Desa Karangsari, kesibukan pekerjaan, kesibukan sebagai pelajar, kepercayaan kepada pemerintah rendah, kurangnya pendidikan politik, tidak mendapat uang untuk memilih, kesibukan mengurus rumah tangga, perasaan tidak mampu, kurangnya sosialisasi politik, kelemahan dalam penyusunan DPT, sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Presiden 2014 adalah penerimaan terhadap perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial dan lingkungan politik yang kondusif.

Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian yang telah oleh Rizki Amorowayan A dan Aulia Sholichah Iman Nurchotimah adalah pada objek penelitian yaitu pada bidang partisipasi politik. Kemudian untuk perbedaan terletak pada subjek yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amorowayan A memiliki subjek Etnis Tionghoa di Kab Pati dan Aulia Sholichah Iman Nurchotimah memiliki subjek Pemilih Pemula Di Desa Karangsari kemudian untuk penelitian yang akan saya lakukan memiliki subjek Anak TNI di Asrama Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

C. Kerangka Pemikiran

Rachman (dalam Tecia, 2014:18-19) menyatakan “kerangka berpikir merupakan kumpulan konsep-konsep relevan yang terintegrasi dalam satu sistem penjelasan yang berfungsi sebagai hipotesis kerja. Kerangka berpikir digunakan sejak penyusunan metode, pelaksanaan di lapangan dan pembahasan

hasil penelitian. Kerangka berpikir di sajikan dalam bentuk uraian dan dapat di perjelas dengan bagan”.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Karena merupakan salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan politik seperti menggunakan hak pilih, melakukan lobbying dengan pihak pemerintah, ikut dalam anggota partai dan sebagainya yang mana tujuan dari itu semua adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

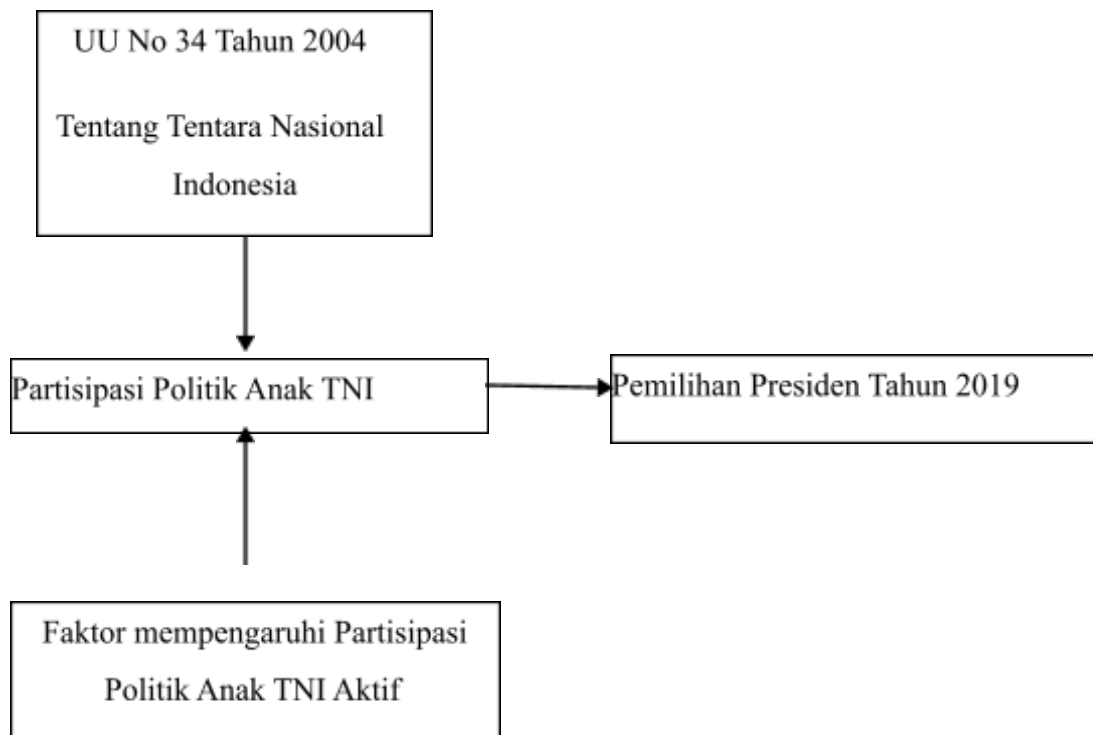
Pemilihan Presiden tahun 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019 yang mana diikuti oleh berbagai kalangan yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah kalangan dari para anak TNI. Yang menjadi menarik dari tiap diadakannya pemilihan umum adalah adanya partisipasi politik dari anak TNI dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam kasus ini lah penting mengetahui proses sosialisasi dan partisipasi politik yang terjadi dalam diri seorang anak dari TNI yang dimana orang tua (TNI) mereka yang telah berkomitmen untuk tidak menggunakan hak pilihnya demi tujuan mampu berdiri disegala golongan dan menjaga keutuhan internal dari TNI di Indonesia.

Maka dari adanya fenomena tersebut perlu pentingnya untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang mempengaruhi proses partisipasi politik dari anak TNI tersebut dan agen-agen mana saja yang sangat berperan dalam membentuk jiwa partisipasi politik dari anak TNI yang hidup lingkungan masyarakat yang mana terdapat golongan yang memang tidak

menggunakan hak pilihnya demi keseimbangan politik di Indonesia.

Gambar 2. 1.

Kerangkar Berfikir



D. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah dan rumusan masalah penelitian ini, maka asumsi penelitian ini adalah

1. Bahwa partisipasi politik anak-anak TNI ddalam Prilres 2019 ini cukup tinggi hal ini di tandai dengan banyaknya anak –anak TNI yag menjadi anggota relawan salah satu pasangan calon Presiden 2019.
2. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Anak TNI adalah

ketertarikan generasi muda dikalangan anak TNI dalam dunia politik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.. Desain Penelitian

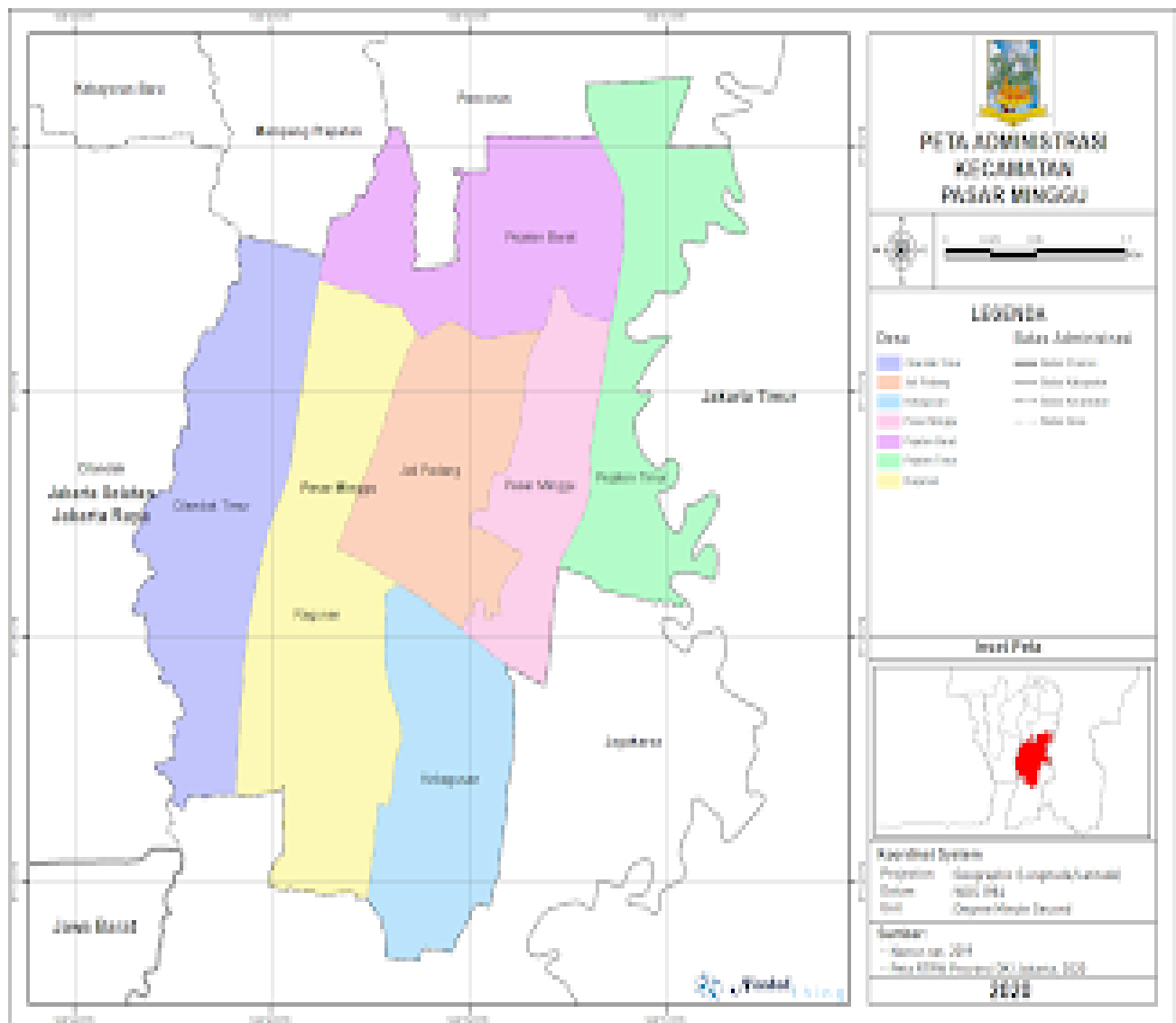
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan data dengan menerangkan, memberi gambaran yang terkumpul kemudian disimpulkan.

Metode penelitian kualitatif (dalam Sugiono,2011:1) adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini sering pula disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2004:12) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1. Mengenai lokasi penelitian yang ingin diteliti, penulis memutuskan untuk meneliti di Wilayah Kelurahan Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3.1
Peta Kelurahan Cilandak Timur



Sumber data dari Kecamatan Pasar Minggu

3.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waku Kegiatan																								
		2018				2019												2020		2021						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-6	7-12	1-6	7	8	9	10	11	12
1	Penerimaan SK Bimbingan																									
2	Bimbingan Penyusunan Skripsi																									
3	Penyusunan Usulan Penelitian																									
4	Sidang Usulan Penelitian																									
5	Revisi UP dan pengurusan izin Penelitian																									
6	Observasi Lapangan dan Penelitian																									
7	Penyempurnaan Skripsi																									
8	Sidang Komprehensi																									
9	Revisi Hasil Sidang Komprehensif																									
10	Pengumpulan Skripsi utk Penjilidan Hardcover																									
11	Wisuda Tahun 2021																									

Sumber data Kalender Akademik STIPAN 2021

C. Latar/setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Asrama Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta Dimana sebelumnya peneliti telah melakukan survei awal, pada wawancara yang telah dilakukan, peneliti telah memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu, Dari hasil Wawancara yang telah dilakukan tersebut, peneliti mendapatkan sebuah informasi yang menurut peneliti adanya permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti telah menetapkan latar penelitian ini Asrama Marinir Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta

D. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik Wawancara

Wawancara mendalam merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk menambah data yang diperlukan melalui tanya jawab seputar topik yang terkait dengan permasalahan ini. Yang akan menjadi sumber data utama adalah pihak-pihak yang dapat mewakili dan dianggap berkompeten untuk memberikan data yang valid.

Dalam tahap wawancara , penulis mengajukan informan- informan sebagai bentuk dari kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.2 Data Informan

NO	Informan	Jumlah
1	Purnawirawan TNI	2
2	Generasi Muda Asrama Marinis	2

3	Komandan Batalyon Marinir	2
Jumlah		6

- Teknik Studi Dokumentasi

Pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya

E. Teknik Analisis Data

Setelah mengamati dan mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang kedalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu secara ringkas dalam menganalisa data penulis akan melakukan tiga tahapan analisa menurut Miles dan Huberman yakni reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Analisis data kualitatif ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dapat dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan di lapangan akan diorganisasikan kedalam pedoman wawancara.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

“Dalam Pengujian Keabsahan dan metode penelitian kualitatif kabsahan data dapat diuji keabsahannya sebagai berikut: Kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*), Dependabilitas (*Dependability*), dan Confirmability hasil penelitian Sugiono” (2011:366).

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada penguji terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak. Setelah dicek kembali kelapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan

maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan judul.

c. Trianggulasi

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validasi data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono 2007:275).

e. Mengadakan *Member Check*

Tujuan membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiono 2011:276).

2. *Transferability*

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. (Sugiono 2011:276)

Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika peneliti dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi social yang berbeda validasi nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Peneliti yang dependability atau reliabilitas adalah apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Penguji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian..

4. *Confirmability*

Objek pengujian kualitatif disebut juga comfirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih dari banyak orang. Penelitian kualitatif uji comfirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Teknik pemeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi, bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan dengan menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Menurut wiersma (1986) “mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber”. “Dengan demikian terdapat Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Dan Triangulasi Waktu”. (Sugiono 2011:273)

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya diminta

kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji Kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Trianggulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu satau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono 2011:274).

BAB IV

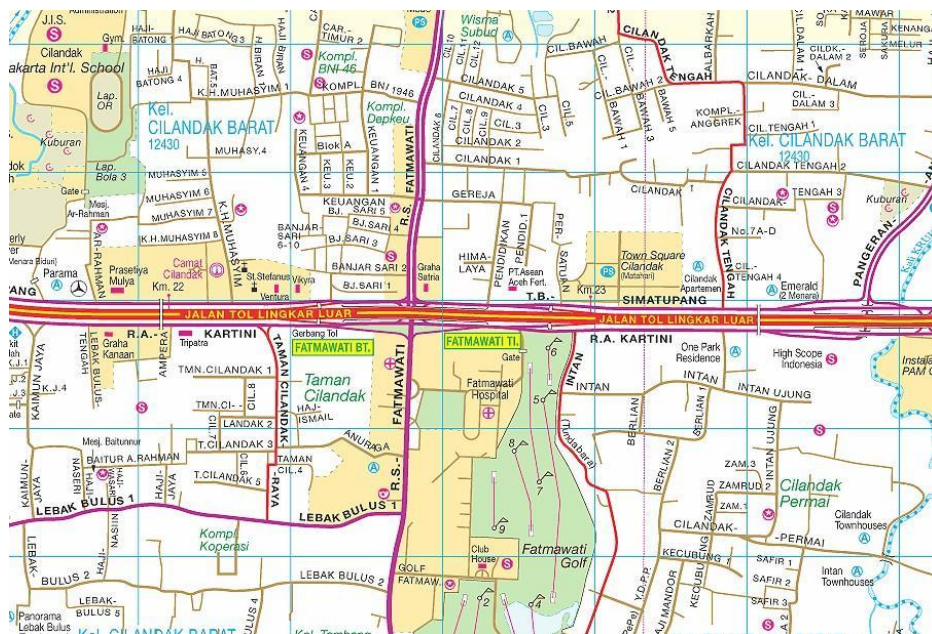
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kelurahan Cilandak Timur

4.1.1 Kondisi Geografis

Cilandak Timur adalah kelurahan yang termasuk ke dalam batas administrasi Jakarta Selatan terbagi ke dalam 13 RW dan 150 RT, dan memiliki luas wilayah 604,4 Ha dengan batas-batas daerah sebagai berikut.

- | | |
|---------|---|
| Utara | : Kelurahan Gandaria Selatan |
| Selatan | : Kali Krukut, Kel. Cilandak Barat |
| | Kec. Pasar Minggu |
| Barat | : Kelurahan Pondok Labu |
| Timur | : Kali Grogol, Kel. Lebak Bulus, dan Kel. Pondok Pinang |



Gambar 3.1 Peta kelurahan Cilandak Timur

Sumber: Telah diolah kembali dari Jakarta Map 2018

Secara geografis, Cilandak Timur terletak di antara Pasar Minggu dan Pondok Indah. Di sebelah timur, Cilandak Timur berbatasan dengan Pondok Labu, dekat dengan rumah sakit swasta Panti Nugraha dan SDN 14 Pagi. Umumnya anak-anak di Cilandak Timur bersekolah di sekolah dasar tersebut. di sebelah barat, Cilandak Timur berbatasan dengan kompleks marinir. Antara Cilandak Timur dan kompleks marinir hanya dipisahkan dengan Kali Krukut. Di perbatasan bagian barat ini banyak sekali dijumpai berbagai tempat perbelanjaan berskala sedang seperti Cilandak Town Square, Hero Supermarket, dan Cahaya Plaza. Sementara di bagian utara, Cilandak Timur berbatasan dengan sekolah Sumbangsih, SMPN 56, SMPN 212 dan Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut. Di bagian selatan, Cilandak Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Fatmawati dan Kantor Pos Besar.

Dahulu wilayah Cilandak Timur termasuk ke dalam wilayah Desa Pondok Labu. Pertambahan penduduk yang terus terjadi di wilayah ini, maka Cilandak Timur memisahkan diri dan menjadi satu wilayah administratif sendiri. Pada awal berdirinya, kelurahan ini hanya memiliki 10 RT dengan tiap RT terdiri dari 15-20 Kepala Keluarga (KK). Sekarang wilayah Cilandak Timur terbagi menjadi 13 RW dan 169 RT. Berikut merupakan perincian jumlah RT dan RW di Cilandak Timur.

1. RW 01	: 14 RT
2. RW 02	: 16 RT
3. RW 03	: 9 RT
4. RW 04	: 15 RT
5. RW 05	: 11 RT
6. RW 06	: 17 RT
7. RW 07	: 4 RT

8. RW 08	: 8 RT
9. RW 09	: 7 RT
10. RW 10	: 14 RT
11. RW 11	: 10 RT
12. RW 12	: 11 RT
13. RW 13	: 14 RT

4.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Cilandak Timur hingga akhir tahun 2008 adalah sebanyak 58.174 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.462 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.690 jiwa. Kelurahan ini terdiri dari 11.620 KK laki-laki dan 1.090 KK Perempuan. penduduk yang tinggal di wilayah ini tidak hanya penduduk pribumi, melainkan pula Warga Negara Asing (WNA) yaitu sebanyak 23 orang. Adapun perincian jumlah penduduk Kelurahan Cilandak adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	WNI		WNA		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	3027	2992	-	-	6019
2.	5-9	2290	2010	-	3	4303
3.	10-14	2331	2121	-	-	4452
4.	15-19	2968	2857	2	-	5827
5.	20-24	3239	5375	1	1	8616
6.	25-29	3725	3780	-	-	7505
7.	30-34	3390	3046	-	-	6436
8.	35-39	2565	2129	1	-	6495
9.	40-44	1849	1556	3	1	3409

10	45-49	1609	1243	2	-	2854
11.	50-54	1161	815	2	-	1976
12.	55-59	933	543	-	3	1479
13.	60-64	598	440	-	1	1839
14.	65-69	315	366	-	-	681
15.	70-74	287	349	-	-	536
16.	> 75	213	199	1	2	415
Jumlah		30.462	27.690	12	11	58.174

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Barat, 2008

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk Kelurahan Cilandak mayoritas adalah penduduk usia produktif, yaitu sebanyak 44.597 jiwa. Adapun penduduk usia muda (15-39 tahun) di wilayah ini termasuk mayoritas di antara kelompok usia lainnya yaitu sebanyak 34.879 jiwa. Penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) adalah sebanyak 14.774 jiwa. Penduduk usia madya (40-59 tahun) adalah sebanyak 9.718 jiwa. Sementara penduduk usia tua (60-75 tahun ke atas) adalah sebanyak 3471 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk Kelurahan Cilandak Timur didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 30.462 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 27.690 jiwa.

3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Ekonomi

Bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan Cilandak Timur diarahkan pada penggalan potensi masyarakat terutama di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat pembinaan ekonomi lemah berbasis masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang

dilakukan adalah mengikutsertakan para pelaku ekonomi dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, sebagai pelaksana kegiatan di tingkat kelurahan, Masyarakat Kelurahan Cilandak Timur bekerjasama dengan Dewan Kelurahan tengah merintis Lembaga Keuangan Mikro sebagai pengganti PPMK.

Berdasarkan data terdapat 3 Kelembagaan ekonomi berbentuk koperasi sebagai sarana bagi warga Cilandak Timur untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Koperasi tersebut terletak di RW 004, RW 009, dan RW 012. Koperasi di wilayah RW 012 sendiri merupakan sebuah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, yaitu Suara Ibu Peduli (SIP). Koperasi SIP di Cilandak Timur ini telah berdiri sejak tahun 1999. Adapun bentuk koperasi tidaklah berbentuk formal, melainkan bersifat kegiatan simpan pinjam dengan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai dasar kegiatannya.

Tabel 4.2 Kelembagaan ekonomi di Kelurahan Cilandak Timur

No.	Jenis Kegiatan Ekonomi	Pengurus		Anggota		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Koperasi					
	A. RW 004		5		64	69
	B. RW 009		6		57	6
	C. RW 012 (Suara Ibu Peduli (SIP))					

	Jumlah		11		121	132
--	--------	--	----	--	-----	-----

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2018

3.1.1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan di wilayah Kelurahan Cilandak Timur merupakan bagian yang sangat penting, mengingat dari kegiatan ini semua akan bersinergi satu dengan yang lain. Dengan memberdayakan perempuan, maka akan semakin kuat dukungan bagi keberhasilan pembangunan di wilayah. Untuk itu, pembinaan PKK merupakan kegiatan rutin bulanan di samping pembinaan majlis taklim. Pelaksanaan kegiatan PKK lebih ditujukan pada pelaksanaan 10 program pokok PKK. Kegiatan PKK juga merupakan ujung tombak keberhasilan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKKS). Berdasarkan data terdapat 18 Majelis Taklim yang aktif mengadakan kegiatan di Kelurahan Cilandak Timur, serta kegiatan PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, dan Dasa Wisma. Berikut rincian data kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kelurahan Cilandak Timur.

Tabel 4.3 Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cilandak Timur

No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Anggota		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Majlis Taklim (18 Majelis Taklim di seluruh wilayah Cilandak Timur)			Ceramah, pengajian, santunan
2.	PKK Kelurahan	1	35	Pembinaan rohani,

3.	PKK RW		91	sosialisasi, Jumat bersih, PSN, Posyandu, Arisan
4.	PKK RT		450	
5.	Dasa Wisma		450	

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2018

3.1.5 Kegiatan Ekonomi

Sektor usaha informal merupakan kegiatan ekonomi yang dominan dilakukan oleh warga Cilandak Timur. Jenis usaha yang dilakukan bervariasi mulai dari usaha warung kelontong, usaha wartel, usaha warnet, usaha material, usaha salon, hingga usaha tanaman hias. Usaha warung kelontong menempati urutan teratas dalam jenis usaha yang paling sering dilakukan oleh warga Cilandak Timur. Tercatat 300 warung kelontong yang ada di wilayah ini. Usaha wartel menempati urutan kedua, yaitu sebanyak 189 wartel. Usaha lainnya yang dominan di wilayah ini adalah usaha salon, yaitu sebanyak 39 salon. Untuk mengetahui lebih rinci, kegiatan ekonomi yang dilakukan di Cilandak Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Kegiatan ekonomi di Kelurahan Cilandak Timur

No.	Jenis Kegiatan Ekonomi	Jumlah usaha	Tenaga Kerja		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Tanaman hias	7 lokasi	24	4	28
2.	Usaha perbengkelan	19 bengkel			
3.	Usaha angkutan	RW 12			
	a. Metro mini		4		4
	b. Mikrolet		4	1	5
4.	Warung kelontongan	300 warung			

5.	Pasar a. Pasar mede b. Pasar inpres Cipete				
6.	Restoran	25 restoran			
7.	Usaha wartel	189 wartel			
8.	Usaha warnet	44 warnet			
9.	Usaha rental mobil	8 rental			
10.	Usaha warteg	32 warteg			
11.	Usaha percetakan	32 percetakan			
12.	Usaha cuci mobil/motor	10 cuci mobil			
13.	Usaha salon	39 salon			
14.	Usaha kafe	1 kafe			
15.	Usaha material	23 material			

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2018

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa sektor usaha informal merupakan sektor usaha yang dominan di wilayah Cilandak Timur. Untuk mendukung kegiatan ekonomi warganya tersebut, maka pihak kelurahan merintis kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di tingkat RT/RW. Diharapkan dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro, masyarakat mampu memperoleh akses ekonomi yang dapat mendukung produktivitas ekonominya. Selain pihak kelurahan, terdapat pula salah satu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan yang membantu masyarakat terutama perempuan untuk memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, yaitu Suara Ibu Peduli (SIP).

Dengan adanya dukungan dari pemerintah setempat dan organisasi nirlaba tersebut diharapkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat berkembang.

3.1.6 Sarana kesehatan

Sarana kesehatan merupakan sarana vital untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan tersedianya sarana kesehatan yang memadai, diharapkan warga Cilandak Timur memperoleh akses untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berikut merupakan sarana kesehatan yang tersedia di Kelurahan Cilandak Timur.

Tabel 4.5 Sarana Kesehatan di Kelurahan Cilandak Timur

No.	Sarana Kesehatan	Unit
1.	Rumah sakit	2
2.	Rumah bersalin	1
3.	Puskesmas kecamatan	1
4.	Puskesmas kelurahan	1
5.	Poliklinik/balai pengobatan	2
6.	Apotik	6
7.	Posyandu	27
8.	Toko obat	12
9.	Tempat dokter praktek (Bersama)	3
10.	Tempat dokter praktek (Tunggal)	29
11.	Ambulans	22

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2018

Tabel 4.6 Tenaga Ahli Kesehatan di Kelurahan Cilandak Timur

No.	Tenaga kesehatan	Unit
1.	Dokter umum	64
2.	Dokter gigi	9
3.	Dokter spesialis lainnya	7
4.	Paramedis	35
5.	Bidan	5

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2008

3.1.7 Sarana pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan didukung dengan kualitas pendidikan merupakan kombinasi yang penting untuk mencerdaskan masyarakat, dan mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan. Di Cilandak Timur telah tersedia beberapa sarana pendidikan, seperti TK, TPA, SD hingga perguruan tinggi. berikut merupakan rincian sarana pendidikan yang tersedia di wilayah ini.

Tabel 4.7 Sarana Pendidikan di Cilandak Timur

No.	Sarana pendidikan	Unit
1.	S3/S2/S1	1

2.	SLTA Sederajat	12
3.	SLTP Sederajat	8
4.	SD Sederajat	25
5.	TK	19
6.	TPA	25
7.	Lembaga Pendidikan Agama	2
8.	Perpustakaan	1
9.	Toko buku	8

Sumber: Data Kelurahan Cilandak Timur, 2018

4.2. Pembahasan

Istilah partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan atau keikutsertaan masyarakat umum dalam kegiatan politik. Sedangkan makna dari kegiatan politik itu sendiri adalah hal-hal atau aktivitas yang berhubungan dengan dunia politik. Sejalan dengan hal ini, Rush dan Philip Althoff dalam Sitepu (2012), mendefinisikan beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh para pemilih pemua seperti pemberian suara (votting), keanggotaan aktif organisasi politik, keanggotaan pasif organisasi politik, menduduki jabatan politik atau administratif, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Gabriel Almond dalam Syarbaini (2002), yang juga memaparkan beberapa partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula yakni votting, mengikuti kegiatan kampanye, diskusi politik dan lain-lain yang tergolong dalam partisipasi politik konvensional. Sedangkan golongan partisipasi politik yang tidak konvensional seperti demonstrasi, pengeboman, konfrontasi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, bentuk-bentuk kegiatan politik yang dilakukan masyarakat serta keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis partisipasi politik. Seperti yang telah dipaparkan oleh Milbrath dan Goel dalam Choilisin (2007) bahwa terdapat empat jenis partisipasi politik yakni:

1. Partisipasi politik apatis

Partisipasi politik jenis ini dapat diartikan sebagai golongan masyarakat yang tidak pernah melibatkan dirinya dalam kegiatan politik. Dalam arti lain, seseorang tidak memiliki rasa ketertarikan atau dorongan untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

2. Partisipasi politik spectator

Partisipasi politik spectator merupakan jenis partisipasi politik yang terdiri dari golongan masyarakat yang setidaknya pernah ikut serta dalam kegiatan politik meskipun hanya satu kali dalam hidupnya.

3. Partisipasi politik gladiator

Partisipasi politik gladiator didefinisikan bagi golongan masyarakat yang cukup aktif dalam kegiatan politik. Di sisi lain, partisipasi politik jenis ini merupakan masyarakat yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang cukup banyak dalam bidang politik.

4. Partisipasi politik pengkritik

Partipasi politik pengkritik merupakan partisipasi politik yang terdiri dari golongan masyarakat yang ikut serta melakukan kegiatan politik yang

tidak konvensional.

Seperti halnya dalam bidang lain, di bidang politik seseorang akan melakukan sebuah kegiatan juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi penilaian seseorang apakah akan melibatkan dirinya atau tidak dalam kegiatan tersebut. Milbrath dan Goel dalam Choilisin (2007), menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengaruh partisipasi seseorang dalam kegiatan politik diantaranya:

1. Keterbukaan informasi seseorang terhadap perangsang politik. Saat ini, informasi politik yang dapat diperoleh seseorang sudah sangat beragam seperti informasi dari media sosial, media massa, organisasi dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang terlebih dalam hal penentuan pilihan ketika pemilu.
2. Karakteristik seseorang, tidak sedikit masyarakat yang juga mempertimbangkan karakteristik para calon pemimpinnya. Karakteristik tersebut dapat berupa agama, ras, suku, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
3. Sistem politik di daerah tempat tinggal. Kegiatan kampanye di daerah-daerah tertentu yang juga bertujuan untuk meningkatkan dukungan masyarakat tentu saja sangatlah berpengaruh terhadap pilihan masyarakat.
4. Perbedaan regional. Saat ini sudah tak asing lagi bahwa banyak peristiwa yang terjadi di berbagai daerah pada saat pemilu. Hal tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh sikap dan watak masyarakat

yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kelurahan Cilandak Timur yang memiliki jumlah pemilih pemula paling tinggi diantara kelurahan yang lain di Kecamatan Pasar Minggu. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan sebuah wawancara kepada sepuluh orang partisipan yang merupakan pemilih pemula. Dalam hal ini, peneliti menggunakan inisial para partisipan guna menjaga privasi identitas partisipan. Hasil wawancara tersebut dapat di lihat dari deskripsi di bawah ini.

Wawancara pertama, dilakukan bersama partisipan berinisial ZM. ZM menjelaskan bahwa ia sangat tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu tahun 2019. Kegiatan yang di ikutinya berupa menjadi anggota administratif di TPS dan pemungutan suara. Ia juga menyatakan bahwa dirinya gemar membaca dan mengumpulkan informasi politik di media sosial. Menurutnya, informasi tersebut dapat membantu dirinya dalam menentukan pilihan calon anggota atau pemimpin saat pemilu.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa ZM merupakan salah satu pemilih pemula yang mendukung kegiatan politik dengan cara berpartisipasi sebagai anggota administratif di TPS dan melakukan pemungutan suara hal tersebut menunjukan bahwa ZM termasuk

ke golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator . seperti yang di jelaskan oleh Milbrath dan Goel bahwa partisipasi politik spectator adalah golongan masyarakat yang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Selain itu, keterbukaan ZM terhadap informasi- informasi politik melalui media sosial menjadi pengaruh ZM untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Milbarth dan Goel bahwa salah satu faktor partisipasi politik seseorang adalah keterbukaan seseorang terhadap perangsang politik.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial DJ. Dalam wawancara tersebut DJ menyatakan bahwa ia hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara saja. Hal ini di karenakan ia belum tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan politik lainnya. Selain itu, hal- hal yang mendorong DJ untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu adalah keluarga. Ia mengatakan bahwa keluarganya akan memberikan informasi-informasi mengenai calon pemimpin atau anggota yang memiliki kesamaan ras, suku, dan agama. Tidak luput juga media sosial yang sangat mendukung dalam memperbanyak informasi politik.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa DJ belum memiliki ketertarikan lebih untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini dapat di lihat dari keteranga DJ yang menyatakan bahwa faktor pendorong untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah kesamaan karakteristik sosial. Milbrath dan Goel menyatakan bahwa pengaruh karakteristik sosial seperti kesamaan gender, ras, agama, suku, budaya dan lain-lain. Kendati demikian, DJ tetap

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2019. Maka dapat di simpulkan bahwa DJ merupakan pemilih pemula yang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik atau di sebut juga dengan partisipasi politik spectator.

Wawancara dengan partisipan berinisial DS. Dari hasil wawancara tersebut, didapati bahwa DS merupakan pemilih pemula yang baru berusia 28 tahun pada tahun 2019. Sehingga pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertamanya. DS juga menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti kegiatan pemungutan suara saja. Hal ini disebabkan oleh DS belum memiliki keberanian dan informasi politik yang cukup serta pengalaman dalam bidang politik. Selain itu, DS juga mengungkapkan bahwa ia mengalami perbedaan pendapat dengan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Dimana terdapat partai mayoritas di daerah tersebut yang berbeda dengan keinginannya sendiri sehingga menyebabkan DS kurang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan politik lainnya. Menurutnya, pemungutan suara (votting) yang ia lakukan dapat juga membantu pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi DS dalam berpartisipasi politik adalah sistem politik atau partai di daerah tempat tinggal. Perbedaan pendapat atau dukungan seseorang dengan masyarakat sekitar menjadi sebuah penyebab seseorang menjadi tidak aktif dalam kegiatan politik. Dengan kata lain seseorang hanya akan melakukan kegiatan politik minimalis saja seperti hanya melakukan pemungutan suara saja. Meskipun demikian, DS tetap melakukan

kewajibannya sebagai masyarakat yang baik dan tetap ikut serta berpartisipasi dalam bidang politik. Maka dapat disimpulkan bahwa DS merupakan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator yang berarti seseorang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik meskipun hanya sekali dalam hidupnya.

Berikutnya, wawancara bersama partisipan berinisial AP. Dalam wawancaranya AP mengatakan bahwa ia cukup aktif dalam mengikuti kegiatan politik. Pada pemilu tahun 2019, ia sempat menjadi panitia pemilu di TPS di lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga melakukan kegiatan pemungutan suara (votting). Hal ini didukung oleh motivasi AP untuk terjun di bidang politik. Selanjutnya, ia juga sering membaca dan mencari informasi politik melalui media sosial berupa informasi mengenai para calon juga berita-berita politik lainnya. Menurutnya informasi tersebut penting juga untuk menetapkan keputusan mengenai pilihan yang terbaik.

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipan AP merupakan pemilih pemula yang cukup aktif dalam kegiatan politik. Faktor pendorong AP untuk melakukan hal tersebut tidak hanya keinginan Ap untuk terjun dalam bidang politik namun juga karena keterbukaan diri AP terhadap perangsang politik. Informasi-informasi yang tersebar di media sosial sejatinya juga bertujuan untuk mempengaruhi atau merangsang masyarakat untuk tertarik membaca dan mengenal politik. Dari pernyataan diatas, AP juga menjelaskan bentuk kegiatan politik yang ia lakukan diantaranya pemungutan suara (votting) dan sebagai anggota administratif (panitia di TPS). Dengan kata lain, AP juga

termasuk ke dalam golongan masyarakat dengan jenis partisipasi politik spectator dengan melakukan kegiatan politik minimalis.

Wawancara bersama partisipan berinisial AW. Dalam proses wawancaranya, AW menjelaskan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan kampanye partai politik. Dalam kegiatan tersebut AW berpartisipasi sebagai peserta kampanye. Melalui kegiatan kampanye tersebut AW mendapatkan pengalaman serta pengetahuan tentang partai politik. Selain itu, kegiatan tersebut juga membantunya untuk membuat keputusan pada saat pemilu tahun 2019 lalu. AW juga menyatakan bahwa media sosial membantunya untuk mendapatkan informasi-informasi politik. Lalu, AW juga mengatakan bahwa lingkungan keluarga dan teman juga membantu AW dalam mendapatkan informasi-informasi politik.

Bentuk kegiatan yang dilakukan AW diantaranya adalah pemungutan suara (votting) dan peserta kampanye partai politik. Selain itu, AW juga merupakan seseorang yang memiliki sikap terbuka terhadap rangsangan. Seperti yang telah dijelaskannya bahwa AW dapat dengan mudah menerima informasi dari berbagai sumber yang berbeda seperti keluarga, teman dan sosial media. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi AW untuk melakukan kegiatan politik adalah keterbukaan AW terhadap perangsang politik berupa informasi-informasi politik dan lainnya. Selanjutnya, dilihat dari bentuk kegiatan politik yang diikutinya, AW dapat dikategorikan sebagai golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator.

Lalu, wawancara bersama partisipan berinisial EK. EK menjelaskan bahwa kegiatan politik yang ia ikuti saat pemilu tahun 2019 adalah pemungutan suara dan membantu panitia pengawas pemilu sebagai panitia di TPS. Alasan EK dapat menjadi salah satu panitia di TPS adalah dorongan dari keluarga. Selain itu, EK merasa sosial media seperti WA, IG, Facebook juga menjadi media penyalur informasi politiknya. Di sisi lain sistem politik atau sistem partai tempat tinggal juga dinilai sangat membantu dalam menentukan keputusan dalam pemilu. Hal ini dikarenakan setiap partai atau calon yang mendominasi di lingkungan tempat tinggalnya telah dinilai baik bagi masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa EK merupakan pemilih pemula yang termasuk ke dalam jenis partisipasi politik spectator. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang ia ikuti yakni pemungutan suara dan anggota panitia pengawas pemilu. EK mendapatkan dorongan atau motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut dari informasi yang disebarkan oleh keluarga, teman dan media sosialnya. Maka dapat dikatakan bahwa EK merupakan orang yang memiliki kepekaan atau keterbukaan diri terhadap berbagai sumber informasi.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial FA. Dalam wawancaranya, FA mengatakan bahwa ia melakukan kegiatan politik berupa pemungutan suara dan demonstrasi. Hal ini didorong oleh keinginannya untuk membela keadilan untuk masyarakat. Selain itu, hal ini juga dipicu oleh informasi-informasi yang tidak sepadan dengannya sehingga ia memutuskan untuk melakukan tindakan demonstrasi.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa FA memiliki sikap yang sangat mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diterimanya. Informasi-informasi tersebutlah yang menjadi dorongan FA untuk melakukan sebuah tindakan seperti demonstrasi. Namun, di sisi lain FA tetap menunjukkan partisipasi lain dan menunjukkan bahwa FA tetap menjadi masyarakat yang taat aturan dengan melakukan pemungutan suara. Singkatnya, FA merupakan salah satu pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik pengkritik. Hal ini didasari oleh keterangan FA yang menyatakan bahwa ia melakukan tindakan demonstrasi dimana tindakan tersebut adalah sebuah bentuk kegiatan politik yang tidak konvensional. Milbrath dan Goel menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan politik berupa kegiatan yang tidak konvensional maka ia termasuk ke dalam jenis partisipasi politik pengkritik. Kegiatan politik yang tidak konvensional itu sendiri juga disampaikan oleh Syarbaini (2002) berupa mogok, tindak kekerasan, demonstrasi dan lain-lain.

Berikutnya, wawancara bersama partisipan berinisial JA. Dalam hal ini, JA menyatakan hal yang sama dengan partisipan sebelumnya bahwa ia juga melakukan kegiatan demonstrasi dan pemungutan suara (voting). Lalu, JA juga menjelaskan tentang alasannya ikut serta dalam kegiatan tersebut adalah adanya informasi tentang isu-isu politik yang tersebar di media sosial seperti twitter dan instagram. Selain itu, dorongan dari teman-teman di lingkungan perkuliahan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa JA merupakan pemilih pemula

yang memiliki keterbukaan akan informasi-informasi politik yang menjadi sebuah pengaruh bagi JA untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Di sisi lain, JA juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan mengikuti pemilu. Dari penjelasan tersebut maka JA dapat dikategorikan menjadi pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik pengkritik.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial DA. Dalam wawancaranya, DA mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan pada tahun 2019 ialah pemungutan suara dan sebagai peserta sosialisasi partai politik di kampus. Ia juga mengatakan bahwa ia menyukai kegiatan tersebut karena ia dapat belajar hal-hal baru tentang politik. Selain itu, DA juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilu. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu menciptakan daerah dan negara Indonesia menjadi lebih maju dengan pemimin yang baik. DA juga menjelaskan bahwa keadaan atau kondisi pemilu di daerahnya sangat mendukung untuk melaksanakan pemilu.

Maka dapat disimpulkan bahwa DA merupakan golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator. Hal ini ditunjukkan oleh DA bahwa kegiatan politik yang diikutinya berupa pemungutan suara dan peserta sosialisasi partai politik. Selanjutnya, DA juga menyatakan bahwa pengaruhnya untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah sikap DA yang terbuka terhadap informasi-informasi politik serta keadaan regional yang mendukung jalannya pemilu yang kondusif.

Wawancara yang terakhir dilakukan bersama partisipan berinisial AK. Ia menyatakan bahwa kegiatan politik yang pernah diikutinya adalah pemungutan suara dan demonstrasi. Menurutnya, sebagai warga negara kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan pemungutan suara. Namun, jika terdapat isu-isu politik yang terjadi dimasyarakat kita juga harus menyuarakannya supaya pemerintah sadar bahwa kita sebagai masyarakat dibawah naungan pemerintah juga harus tetap diayomi, dinaungi, dan diperjuangkan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa AK memiliki sikap yang terbuka terhadap informasi-informasi yang muncul di lingkungan sekitar. Sehingga ia tertarik untuk melakukan kegiatan politik berupa demonstrasi dan pemungutan suara. AK juga dapat dikategorikan sebagai golongan pemilih pemula dengan partisipasi politik pengkritik. Hal ini disebabkan oleh bentuk kegiatan politik yang dilakukannya yakni kegiatan politik yang tidak konvensional.

Berdasarkan seluruh informasi yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap seluruh partisipan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula di Kelurahan Cilandak Timur ialah pemungutan suara (votting), menjadi panitia dalam kegiatan pemilu, kampanye, serta partisipasi politik yang tidak konvensional yakni demonstrasi. Sedangkan jenis partisipasi politik yang banyak di temukan ialah partisipasi politik spectator dan beberapa partisipasi politik pengkritik.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa para partisipan selalu terbuka dengan informasi disekitarnya yang berasal dari berbagai sumber baik melalui media masa, media sosial ataupun keluarga. Kepekaan pemilih pemula terhadap rangsangan politik berupa informasi ataupun berita-berita politik di berbagai sumber merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik serta merupakan faktor dalam pembuatan keputusan. Selain itu, pilihan para partisipan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan seperti kesamaan ras, suku, agama juga mayoritas partai di lingkungan tempat tinggal serta keadaan regional yang mendukung jalannya pemilu.

Disamping itu, peneliti juga menemukan beberapa hambatan yang menghambat seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Diantaranya adalah sistem politik atau sistem partai di daerah tempat tinggal. Dengan kata lain, suatu daerah akan dikuasi oleh satu partai politik dimana seluruh masyarakat di daerah tersebut harus memilih calon dari partai tersebut juga. Hal ini tentu saja mengakibatkan kurangnya minat pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Pengaruh-pengaruh yang telah dipaparkan oleh Milbrath dan Goel tersebut tidak hanya menjadi faktor pendorong seseorang dalam ikut serta di berbagai kegiatan politik. Akan tetapi, hal tersebut juga menjadi penghambat seseorang dalam partisipasi politik. Singkatnya, jika seseorang tidak memiliki keterbukaan informasi politik maka akan menyebabkan timbulnya golput. Selain itu, meskipun saat ini merupakan zaman modern, pertimbangan

karakteristik calon pemimpin juga dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dimana ia akan menyuarakan haknya apabila calon pemimpin memiliki kesamaan karakteristik dengan dirinya. Selanjutnya, akibat kegiatan kampanye di daerah tertentu menyebabkan pemerataan dukungan masyarakat. Sehingga menyebabkan munculnya pembagian daerah seperti satu daerah hanya akan mendukung partai yang melakukan kampanye di daerah tersebut. dengan kata lain penduduknya seolah wajib mendukung partai dan calon itu saja. Keadaan regional tempat tinggal menjadi pengaruh terakhir partisipasi politik seseorang. Sikap dan watak penduduk daerah tersebut menentukan bagaimana jalannya kegiatan pemilu. Apakah akan berjalan baik, aman, serta kondusif atau sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk partisipasi politik Anak TNI pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terjadi dalam beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu seperti menggunakan hak pilih, diskusi politik, dan ikut sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPS. Dari beberapa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh anak TNI di Kelurahan Cilandak Timur diskusi politik informal yang dilakukan anak TNI menjadi bentuk partisipasi politik yang unik karena diskusi politik yang mereka lakukan hanya sebatas pada teman saja dan bukan dilakukan bersama orang tua mereka karena status orang tua mereka sebagai TNI yang harus menjaga netralitas mereka terhadap segala urusan politik.
2. Faktor pendorong partisipasi politik anak TNI di Kelurahan Cilandak Timur dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) adanya rangsangan, 2) karakteristik pribadi seseorang, 3) sosial ekonomi, 4) kesadaran politik, 5) informasi dari

media massa dan 6) latar belakang calon kandidat. Faktor penghambat partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) kesibukan sebagai pelajar, 2) kesibukan dalam bekerja, dan 3) anggapan partisipasi politik merupakan kesia-siaan.

5.2. Saran

1. Parpol, Ormas, dan Media massa dapat meningkatkan partisipasi politik anak TNI dengan diadakannya kegiatan sosialisasi politik, sehingga anak TNI akan lebih tahu akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang memiliki peran besar dalam memilih pemimpin baik di masa depan.
2. KPUD Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengadakan sosialisasi politik atau diskusi politik untuk kalangan remaja pada setiap Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basrowi, Sukidin dan Suko Susiolo. (2012). *Sosiologi Politik..* Bogor: Ghalia Indonesia
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko. (2008). *Sosiologi Politik*. Semarang: UNNES Press
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Sahat Simamor, penerjemah : Jakarta PT Rineka Cipta
- Hasan, Ibnu. (2006). *Sistem Politik, Idiologi, Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jatinangor :Pusat Kajian Pemerintahan STPDN
- Maliki, Zainuddin. (2018). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Maran, Rafael Raga. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: CV, Rajawali
- Samego, Indria. (2000). *TNI Di Era Perubahan*. Jakarta: Erlangga
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sugioo. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit. CV Alfabeta, Bandung
- Sunarto. (2016). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana

BUKU ONLINE

- Mujani, Saiful. (2007). *Muslim Demokrat: Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mMKxsD7xAHgC&oi=fnd&pg=PA5&dq=partisipasi+politik&ots=mVLnWrX7nt&sig=1_uhvs3_CFhVMqghVTAYnJJLUg&redir_esc=y#v=onepage&q=partisipasi%20politik&f=false
- Supeno. Hadi. (2010). *Kriminalisasi Akan Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=oZNnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+anak+menurut+uu&ots=aydA6PF46Y&sig=s16qK6RkcpKTFcqKXb1mUy3Ugq0&redir_esc=y#v=onepage&q=difinisi%20anak&f=false
- Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD <http://eprints.unlam.ac.id/2160/1/SOSIOLOGI%20POLITIK%20Sejarah%20C%20Definisi%20dan%20Perkembangan%20Konsep.pdf>

JURNAL

- Daud. M. (2015). Prediktor Perilaku Pemilih Dalam Pemilu : Prespektif Psikologi Politik. *Talenta*, September 2015. 87-96. Vol 1. No 1. <http://ojs.unm.ac.id/talenta/article/view/5235>
- Firdaus, Dede Wahyu. (2018). Kebijakan Dwi Fungsi ABRI Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998. *Jurnal UPI Bandung*. 1-13.
http://jurnal.upi.edu/file/KEBIJAKAN_DWIFUNGSI_ABRI_DALAM_PERLUASAN_PERAN_MILITER_DI_BIDANG_SOSIAL.pdf
- Fonataba, Feri F. (2016). Partisipasi Masyarakat Papua Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (suatu studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua). *Jurnal Politico*. 1-16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/13373>
- Jimly Asshiddiq. (2016). Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*. 6-29. Vol 3, No 4. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%20

201.pdf

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petunjuk

1. Setiap Informan mendapatkan pertanyaan dari peneliti sesuai dengan kebutuhan.
2. Pertanyaan yang diberikan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

B. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

C. Waktu dan Lokasi wawancara

Wawancara dilaksanakan selama observasi berlangsung, yaitu dimulainya setelah sidang usulan penelitian yang diikuti oleh peneliti sampai dengan masa sebelum sidang komprehensif digelar.

Lokasi wawancara bertempat di Asrama Marinisr Cilandak Kelurahan Cilandak Timur Pasar Minggu

D. Jenis Informan

1. Purnawirawan TNI
2. Anak-anak Muda TNI
3. Pimpinan Asrama Marinir

E. Daftar pertanyaan

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana pandangan Bpk sebagai Purnawirawan TNI tentang Pilpres 2019?	Purnawirawan TNI
2	Adakah keterlibatan Purnawirawan TNI di dalam Pilpres 2019?	

3	Apa kepentingan Purnawirawan TNI dalam Pilpres Tahun 2019?	
4	Bagaimana Purnawirawan TNI melihat figure soranng calon Presiden dari Sipil?	
5	Bagaimana pandangan saudara sebagai anak TNI tentang Pilpres 2019 ini?	Anak-anak TNI
6	Apa Kepentingan anak-anak TNI di dalam Pilpres 2019 ini?	
7	Bagimana Partisipasi politik anak-anak TNI di dalam mendukung salah satu calon Pilpres 2019 ini?	
8	Bagaimana pandangan Bpk sebagai Pimpinan asrama /komplek TNI Marinir Cilandak melihat peran Purnawirawan TNI dalam Pilpres ini?	Pimpinan Komplek Asrama Marinir Cilandak
9	Bagaimana pandangan Bpk melihat partisipasi Politik anak-anak TNI di dalam kancah Pilpres 2019?	
10	Apa pandangan Bpk tentang Netralitas TNI dalam kancah Pilpres 2019 ini?	

LAMPIRAN 2

SURAT IJIN PENELITIAN


**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA**

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
 Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2017 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
 Kampus :
 Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
 Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id

Jakarta, 09 Maret 2022

No : 122A /STIPAN-A/V/2022
 Lamp : -
 Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Lurah Cilandak Timur Barat

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut di bawah ini, diberikan ijin untuk mengadakan penelitian.

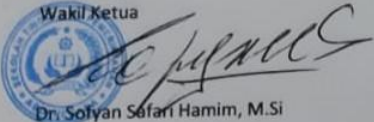
Nama : Puji Widada
 NPM : 142070212
 Judul Skripsi : Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
 Pembimbing : Rahadi Budi Prayitno, S.IP, M.Si

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud.

Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern Kampus.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
 Abdi Negara
 A/n Ketua,
 Wakil Ketua



Dr. Solyan Safari Hamim, M.Si

Tembusan :

Lampiran 3

Surat Rekomendasi Penelitian

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KECAMATAN PASAR MINGGU KELURAHAN CILANDAK TIMUR JL. Bhakti No. 48 A Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 7891556 Fax. (021) 7812282	
Nomor : 190/TM.23.03 Sifat : Penting Lampiran : Hal : Ijin Penelitian	19 Mei 2022 Kepada Yth. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara di Jakarta	
Sehubungan Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan nomor 122A/STIPAN-A/V/2022 perihal Surat Ijin Penelitian, pada prinsipnya kelurahan Cilandak Timur mendukung penelitian sebagai bahan penulisan Skripsi yang akan dilakukan diwilayah Kelurahan Cilandak Timur oleh : Nama : Puji Widada NPM : 42070212 Judul Skripsi : Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Dalam melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan selalu Melakukan Protokol kesehatan yang ketat, menjaga aturan, norma, adat istiadat yang ada dilingkungan masyarakat dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat. Atas perhatian dan Kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.		
 Lurah Kelurahan Cilandak Timur, Bayu Pasca Soengkono, S.Sos NIP. 197803241998031002		

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Puji Widada, lahir di kulon progo pada tanggal 04 september 1980, Merupakan anak ke 10 dari 10 bersaudara dari pasangan Asmo sumarto dan Narsinah, yang sejak kecil dibesarkan di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, penulis juga memiliki 3 orang anak dari seorang istri bernama Ferika Puspita Sari

Penulis masuk Sekolah Dasar di SD Negeri Gembongan dan berhasil menyelesaikan Pendidikan pada tahun 1993, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah menengah Pertama di SMP 1 Sentolo dan berhasil diselesaikan di tahun 1996, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah kejuruan di SMK Bopkri 1 sentolo dan berhasil diselesaikan pada tahun 2000. Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di sekolah tinggi ilmu pemerintahan Abdi Negara dengan memilih jurusan Ilmu Politik pada tahun 2015, selama menempuh Pendidikan di STIP-AN, juga Berperan Aktif menghadiri berbagai seminar sebagai utusan STIP-AN di beberapa Lembaga Pemerintahan, selain itu penulis juga mengikuti seminar wajib bagi Mahasiswa STIP-AN sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang Komprehensif, Wisuda, dan mendapatkan Gelar sarjana Ilmu politik (S.IP)

Walaupun Berstatus mahasiswa Penulis juga masih Berdinas aktif sebagai Abdi Negara Memperkuat jajaran TNI-AL Korps Marinir, Dinas aktif di Brigade Infanteri yang Dinas kesehariannya di batalyon infanteri 6 Korps Marinir di daerah Cilandak Jakarta Selatan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai abdi negara dan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan Tugas akhir Skripsi ini Mampu Memberikan Kontribusi positif bagi dunia perpolitikan.